



PROFIL DINAS SOSIAL

TAHUN 2024
KABUPATEN DELI SERDANG



 (061) 7956111-7956222

 dinassosialdeliserdang@gmail.com

 Jl. Mawar No. 18 Lubuk Pakam

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa karena berkat rahmat dan izinNYA kita telah menyelesaikan Profil Dinas Sosial Kabupaten Deli Serdang Tahun 2024. Ucapan terima kasih kami ucapkan kepada semua pihak yang telah berkontribusi dalam penyusunan Profil Dinas Sosial Kabupaten Deli Serdang Tahun 2024.

Sumber data dalam penyusunan Profil Dinas Sosial Kabupaten Deli Serdang Tahun 2024 adalah Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Deli Serdang serta pengelola program di Dinas Sosial Kabupaten Deli Serdang.

Profil Dinas Sosial Kabupaten Deli Serdang Tahun 2024 menyajikan data dan informasi tentang demografi, sarana sosial, tenaga kesejahteraan sosial dan gambaran umum tentang tugas dan fungsi serta upaya-upaya Dinas Sosial Kabupaten Deli Serdang dalam pengentasan kemiskinan. Data dan informasi yang disajikan ini diharapkan dapat membantu semua pihak agar saling bersinergi dalam menyelenggarakan pembangunan kesejahteraan sosial serta tercapainya sasaran pembangunan kesejahteraan sosial yang berbasis data.

Kami menyadari bahwa dalam penyajian laporan ini masih banyak terdapat kekurangan, oleh karena itu kritik dan saran sangat diperlukan untuk penyempurnaan profil yang akan datang.

Lubuk Pakam, Desember 2024



KEPALA DINAS SOSIAL
KABUPATEN DELI SERDANG


RUDY AKMAL TAMBUNAN, ST, MAB
PEMBINA TK.I

NIP. 19790423 200903 1 003

DAFTAR ISI

PENDAHULUAN

Aspek Geografi	1
Aspek Demografi	2
Latar Belakang	4
Dasar Hukum	5
Tugas Pokok dan Fungsi	6
Kepegawaian	7
Sasaran	11
Strategi	11

UPAYA-UPAYA DINAS SOSIAL KABUPATEN DELI SERDANG dalam PENGENTASAN KEMISKINAN serta LAYANAN REHABILITASI bagi PMKS

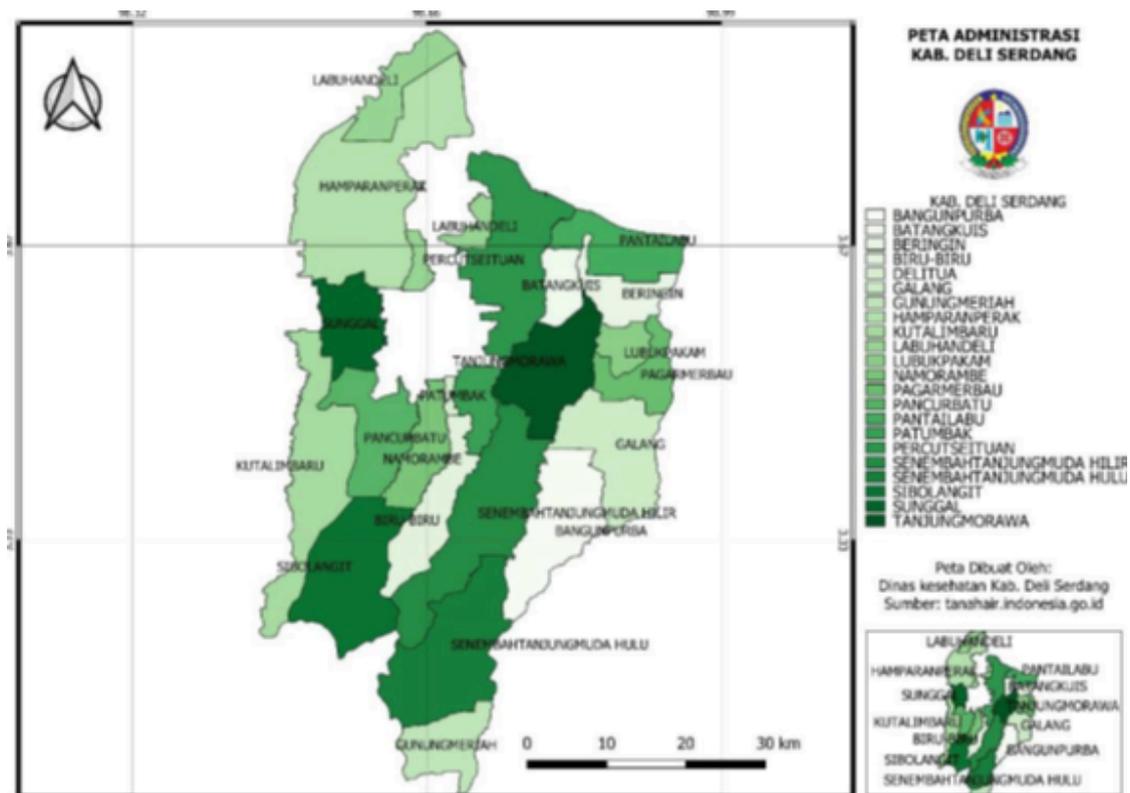
Penyerahan Bantuan Hibah kepada LKS	12
Penanganan ODGJ Terlantar	13
Penanganan Orang Terlantar	14
Layanan Rehabilitasi Sosial Dasar Bimbingan Fisik, Mental dan Spiritual bagi PMKS	15
Pemberian Bantuan Alat Bantu bagi Penyandang Disabilitas	16
Mendampingi Dinas Sosial Provinsi Sumatera Utara Menyerahkan Bantuan UEP	17
Verifikasi dan Validasi Data Bansos	18
Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT)	19
Program Keluarga Harapan (PKH)	20
Sistem Layanan dan Rujukan Terpadu (SLRT)	21
Penanganan terhadap Korban Bencana	22

PENDAHULUAN

Aspek Geografi

Kabupaten Deli Serdang secara administratif mengelilingi Ibu Kota Provinsi Sumatera Utara yaitu Kota Medan. Memiliki luas wilayah sebesar 249.772Ha (2.497,72 Km²) yang terdiri dari 22 Kecamatan, 380 Desa dan 14 Kelurahan. Kecamatan terluas adalah Kecamatan Hamparan Perak dengan luas sebesar 23.015Ha atau 9,21 persen dari luas total wilayah Kabupaten Deli Serdang dan untuk Kecamatan yang memiliki luas wilayah terkecil adalah Kecamatan Deli Tua yaitu 936Ha atau sebesar 0,37 persen dari luas Kabupaten Deli Serdang.

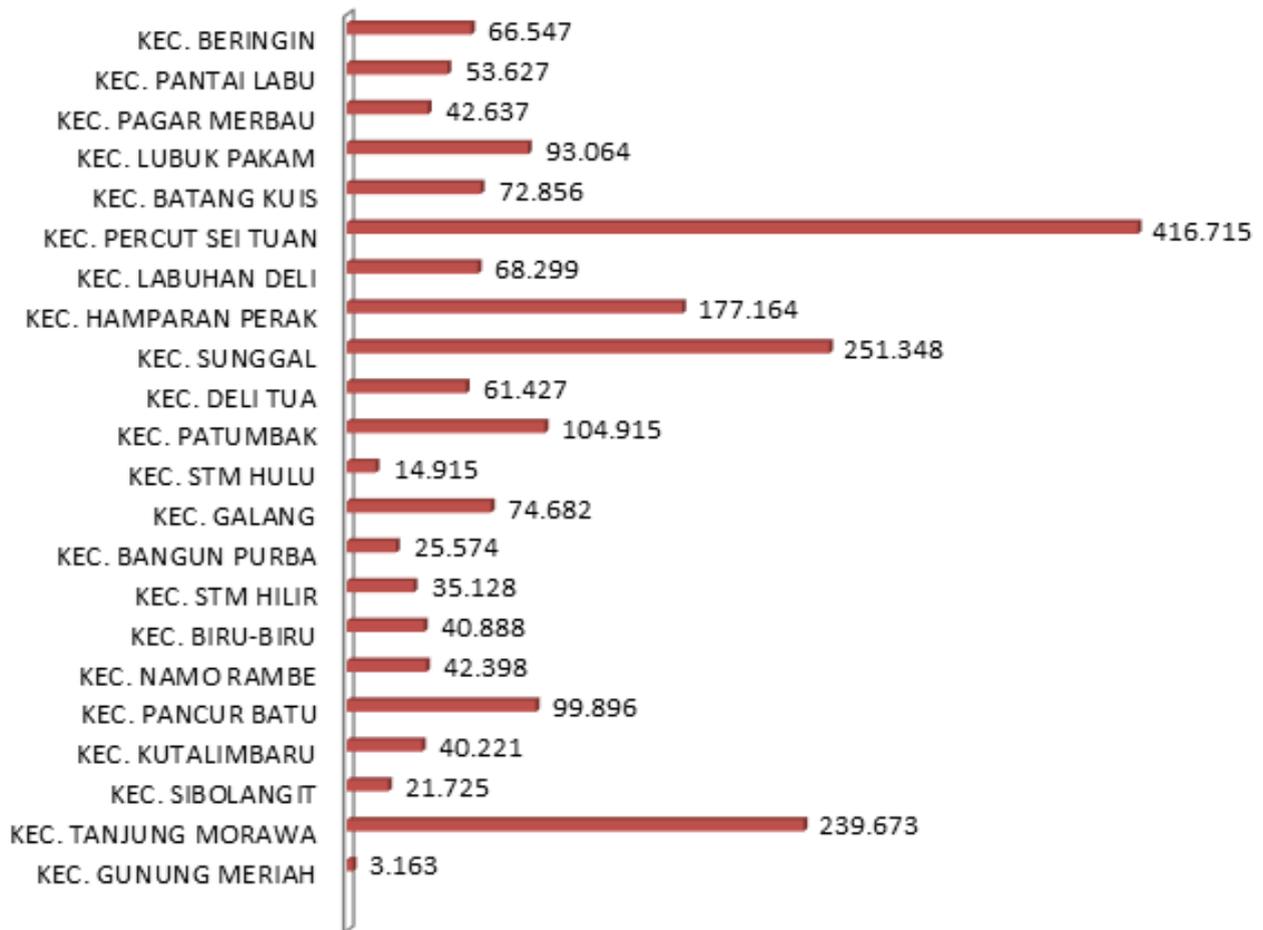
Kabupaten Deli Serdang secara geografis berada pada 2°57' Lintang Utara sampai 3°16' Lintang Utara dan 98°33' Bujur Timur sampai 99°27' Bujur Timur dengan ketinggian 0-500 m di atas permukaan laut. Kabupaten Deli Serdang sebelah Utara berbatasan dengan Kabupaten Langkat dan Selat Malaka, di sebelah Selatan dengan Kabupaten Karo dan Simalungun, sebelah Barat berbatasan dengan Kabupaten Langkat dan Karo dan sebelah Timur berbatasan dengan Kabupaten Serdang Bedagai. Peta administrasi Kabupaten Deli Serdang dapat dilihat pada gambar berikut:



Aspek Demografi

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Deli Serdang memproyeksikan jumlah penduduk Kabupaten Deli Serdang pada Tahun 2024 semester I adalah 2.046.862 jiwa dengan jumlah penduduk laki-laki sebanyak 1.026.782 jiwa dan perempuan sebanyak 1.020.080 jiwa. Jumlah penduduk paling banyak terdapat di Kecamatan Percut Sei Tuan dengan jumlah penduduk sebanyak 416.715 jiwa, sedangkan jumlah penduduk paling sedikit terdapat di Kecamatan Gunung Meriah dengan jumlah penduduk sebanyak 3.163 jiwa. Jumlah penduduk menurut Kecamatan di Kabupaten Deli Serdang Tahun 2024 selanjutnya dapat dilihat melalui tabel berikut:

JUMLAH PENDUDUK MENURUT KECAMATAN DI KABUPATEN DELI SERDANG TAHUN 2024 SEMESTER I



Luas Kabupaten Deli Serdang adalah 2.497,72 km² dengan Kecamatan terluas yaitu Kecamatan Sinembah Tanjung Muda (STM) Hulu (223,38 km²) dan luas Kecamatan terkecil yaitu Kecamatan Deli Tua (9,36 km²). Kabupaten Deli Serdang terdiri dari 22 Kecamatan 394 Desa/Kelurahan. Kecamatan tersebut antara lain adalah Gunung Meriah, STM Hulu, Sibolangit, Kutalimbaru, Pancur Batu, Namorambe, Biru-Biru, STM Hilir, Bangun Purba, Galang, Tanjung Morawa, Patumbak, Deli Tua, Sunggal, Hampan Perak, Labuhan Deli, Percut Sei Tuan, Batang Kuis, Pantai Labu, Beringin, Lubuk Pakam, dan Pagar Merbau. Kabupaten Deli Serdang berada pada di ketinggian wilayah berkisar antara 0-500 meter di atas permukaan laut dan memiliki topografi yang bervariasi. Kondisi tersebut memengaruhi persebaran penduduk, ketersediaan sarana prasarana, intensitas sosial ekonomi, dan kualitas lingkungan.

Berdasarkan topografi wilayah Kabupaten Deli Serdang terbagi atas 3 bagian, yaitu:

- Dataran pantai, meliputi 4 (empat) kecamatan yaitu Hampan Perak, Labuhan Deli, Percut Sei Tuan, dan Pantai Labu dengan luas wilayah sebesar 65.690 ha atau 26,36% dari luas Kabupaten Deli Serdang;
- Dataran rendah, meliputi 11 kecamatan yaitu Sunggal, Pancur Batu, Namorambe, Deli Tua, Tanjung Morawa, Patumbak, Lubuk Pakam, Beringin, Pagar Merbau, Galang, dan Batang Kuis dengan luas wilayah sebesar 71.934 ha atau 28,80% dari luas Kabupaten Deli Serdang;
- Dataran tinggi, meliputi 7 (tujuh) kecamatan yaitu Biru-Biru, STM Hilir, STM Hulu, Gunung Meriah, Sibolangit, Kutalimbaru, dan Bangun Purba dengan luas wilayah 112.147 ha atau 44,9% dari luas Kabupaten Deli Serdang

Kabupaten Deli Serdang merupakan daerah yang beriklim tropis dengan dua musim yaitu musim hujan dan musim kemarau. Pada bulan juni sampai dengan September arus angin yang bertiup tidak banyak mengandung uap air, sehingga menimbulkan musim kemarau. Sebaliknya pada bulan Desember sampai dengan Maret arus angin yang banyak mengandung uap air berhembus sehingga menimbulkan musim hujan. Keadaan ini berganti setiap setengah tahun setelah melewati masa peralihan pada bulan April-Mei dan Oktober-November. Potensi bencana alam yang terdapat di Kabupaten Deli Serdang berdasarkan probabilitas dan dampak dalam penilaian bahaya rencana kontijensi antara lain:

- Banjir, berpotensi terjadi di daerah aliran sungai;
- Angin puting beliung, berpotensi terjadi di seluruh wilayah Kabupaten Deli Serdang;
- Tanah longsor, berpotensi terjadi di wilayah dataran tinggi;



Latar Belakang

Menurut Undang-undang No 11 tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial bahwa yang dimaksud dengan Kesejahteraan Sosial adalah kondisi terpenuhinya kebutuhan material, spiritual, dan sosial warga negara agar dapat hidup layak dan mampu mengembangkan diri, sehingga dapat melaksanakan fungsi sosialnya. Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial adalah upaya yang terarah, terpadu dan berkelanjutan yang dilakukan pemerintah, pemerintah daerah dan masyarakat dalam bentuk pelayanan sosial guna memenuhi kebutuhan dasar setiap warga negara, yang ditujukan kepada Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS). Penyelenggaraan Kesejahteraan sosial meliputi :

1. Rehabilitasi Sosial

Rehabilitasi sosial dimaksudkan untuk memulihkan dan mengembangkan kemampuan seseorang yang mengalami disfungsi sosial agar dapat melaksanakan fungsi sosialnya secara wajar.

2. Jaminan Sosial

Jaminan Sosial dimaksudkan untuk menjamin fakir miskin, anak yatim piatu terlantar, lanjut usia terlantar, penyandang cacat fisik, cacat mental, cacat fisik dan mental, eks penderita kronis yang mengalami masalah ketidak mampuan sosial ekonomi agar kebutuhan dasarnya terpenuhi, juga dimaksudkan untuk pejuang, perintis kemerdekaan dan keluarga pahlawan atas jasa-jasanya.

3. Pemberdayaan Sosial

Pemberdayaan Sosial dimaksudkan untuk memberdayakan seseorang, keluarga, kelompok dan masyarakat yang mengalami masalah kesejahteraan sosial agar mampu memenuhi kebutuhannya secara mandiri. Pemberdayaan sosial dimaksudkan juga untuk meningkatkan peran serta lembaga dan atau perseorangan sebagai potensi dan sumber daya dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial.

4. Perlindungan Sosial

Perlindungan Sosial dimaksudkan untuk mencegah dan menangani resiko dan guncangan dan kerentanan sosial seseorang, keluarga, kelompok dan atau masyarakat agar kelangsungan hidupnya dapat dipenuhi sesuai dengan kebutuhan dasar minimal.

5. Penanggulangan Kemiskinan

Penanggulangan kemiskinan ditujukan untuk meningkatkan kapasitas dan mengembangkan kemampuan dasar serta kemampuan berusaha masyarakat miskin, mewujudkan kondisi dan lingkungan ekonomi , politik dan sosial yang memungkinkan masyarakat miskin dapat memperoleh kesempatan yang seluas-luasnya dalam pemenuhan hak-hak dasar dan peningkatan taraf hidup secara berkelanjutan.

Dasar Hukum

1. Undang-undang Nomor 13 Tahun 1998 tentang Kesejahteraan Lanjut Usia
2. Undang-undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial
3. Undang-undang Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin
4. Undang-undang Nomor 7 Tahun 2012 tentang Penanganan Konflik Sosial
5. Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak
6. Undang-undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas
7. Undang-undang Nomor 39 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial
8. Undang-undang Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (SPM)

Tugas Pokok dan Fungsi

Dinas Sosial Kabupaten Deli Serdang dibentuk berdasarkan Peraturan Bupati Deli serdang Nomor 86 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Sosial Kabupaten Deli Serdang. Dinas Sosial Kabupaten Deli Serdang melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi Kewenangan Daerah dan Tugas pembantuan yang diberikan kepada kabupaten Deli Serdang. Dinas Sosial dipimpin oleh Kepala Dinas yang berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.



**RUDI AKMAL TAMBUNAN, ST, MAB
KEPALA DINAS SOSIAL**



**PETRUS BARUS, SS
SEKRETARIS DINAS SOSIAL**

TUGAS POKOK dan FUNGSI

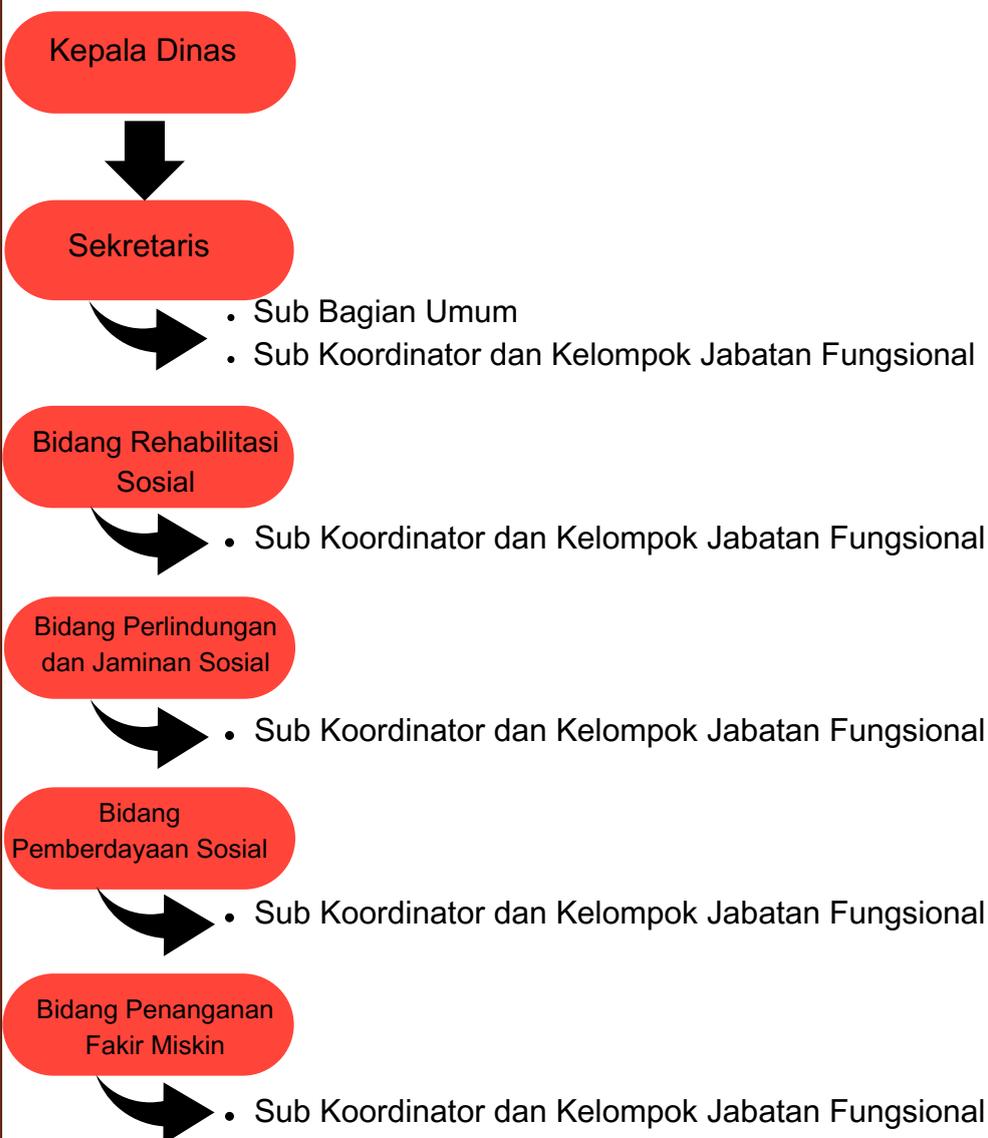
TUGAS

Membantu Bupati menyelenggarakan Urusan Pemerintahan bidang sosial yang menjadi kewenangan Daerah dan Tugas pembantuan yang diberikan kepada Kabupaten

FUNGSI

- Perumusan kebijakan teknis bidang sosial
- Pelaksanaan kebijakan bidang sosial
- Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan bidang sosial
- Pembinaan teknis bidang sosial
- Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya

STRUKTUR ORGANISASI



KEPEGAWAIAN

PNS

NO	NAMA	JABATAN
1	Rudi Akmal Tambunan, ST, MAB	Kepala Dinas
2	Petrus Barus ,SS	Sekretaris
3	Darwis Mahadi Sianipar,S.STP, M.AP	Kabid Perlindungan dan Jaminan Sosial
4	Siti Rahma, S.Sos	Kabid Pemberdayaan Sosial
5	Aflah Khairani, S.Sos	Kabid Rehabilitasi Sosial
6	Ahmad Sofyan, SE	Kabid Penanganan Fakir Miskin
7	Aisyah Nur Onny Bulan	Kasubbag Umum
8	Suparmin, SP	Kepala UPT
9	Fernando Ginting, S.Sos	Kasubbag Tata Usaha UPTD
10	Aida Tio Fitriana Marbun, S.Sos	Perencana Ahli Muda
11	M. Ali Imran Harahap, SH	Pekerja Sosial Ahli Muda
12	Irnawati, SE	Pekerja Sosial Ahli Muda
13	Marisi Uli Bidasari Sinaga	Penyuluh Sosial Ahli Muda
14	Tiodora Pasaribu, SE	Pekerja Sosial Ahli Muda
15	Syarifah Aini, A.Md.Keb	Pekerja Sosial Ahli Muda
16	Mhd. Rifai Nasution, ST	Penyuluh Sosial Ahli Muda
17	Sri Harti, SE	Analisis Tata Usaha
18	Irfan Syahputra, SE, M.Si	Analisis Keuangan
19	Efriliany Putri, S.Sos	Penyuluh Sosial Ahli Pertama

NO	NAMA	JABATAN
20	Budi Harjo	Pengelola Kesejahteraan Sosial
21	Evi Julinta Br.Ginting, SE	Penyusun Program Pembinaan Pranata Sosial
22	Sryenda Marcelina Kembaren, S.Sos	Pekerja Sosial Ahli Pertama

NON PNS di KANTOR DINAS

NO	NAMA	JABATAN
1	Tojok Aliamsyah Situmorang	Pramubakti Umum
2	Hosanna Manullang	Pramubakti Umum
3	Sri Irmayanti	Pramubakti Program
4	Tika Widiastuti	Pramubakti Keuangan
5	Bambang Irawan	Pramubakti PFM
6	Novita Irma Dewi	Pramubakti Pemsos
7	Yogi Setia Kuntirta	Pramubakti Rehsos
8	Tri Kondang Prihatin	Pramubakti Linjamsos
9	Irin Hanafiah Siregar	Operator SIKS-NG
10	Ibnu Prasetyo Aji	Tenaga Ahli Web Developer
11	Rizki Audi Luthfi	Tenaga Ahli Teknis Jaringan
12	Icha Suci Tri Cendani	Tenaga Ahli Design

NO	NAMA	JABATAN
13	Irwinsyah	Tenaga Kebersihan
14	Hasan Basri Nst	Tenaga Kebersihan
15	Wahda	Tenaga Kebersihan
16	Agus Salim	Tenaga Kebersihan
17	Bambang Sunardi	Tenaga Supir
18	Indra Andika	Tenaga Supir
19	Wahyu Indra Utama	Technical Support
20	Sutan Pangihutan Hrp	Back Office
21	Ira Sundari Hsb	Front Office
22	Isnaini Siregar	Front Office
23	M.Reza Pratama, S.Pd	Korkab PKH
24	Victor Patar Pasaribu, M.Kom	Korkab PKH
25	Loli In Christ S	Peksos Anak
26	Tissa Dwi Kartikasari	Peksos Disabilitas
27	Nicko Sisanto	Petugas Keamanan
28	Mhd Fahri Tarigan Sibero	Petugas Keamanan
29	Anugerah Bayu Muttaqin	Petugas Keamanan
30	Maruli Tua M. Tampubolon	Petugas Keamanan



NON PNS di UPT RPS

NO	NAMA	JABATAN
1	Yuni Kartini	Tenaga Administrasi
2	Monica Christina Pasaribu	Tenaga Kebersihan
3	Nursiah	Tenaga Kebersihan
4	Endik Mardi Saputro	Tenaga Kebersihan
5	Surya Kristian Matondang	Tenaga Keamanan
6	Nicko Pratama	Tenaga Keamanan
7	Nasiadi	Tenaga Keamanan
8	Wiwin	Tenaga Keamanan
9	Sunario	Tenaga Kesehatan
10	Devi Ambarita	Tenaga Kesehatan
11	Eka Purwanti	Tenaga Kesehatan

SASARAN

Sasaran Perangkat Daerah adalah meningkatkan pemberdayaan PMKS (Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial). Adapun jenis-jenis PMKS sebagai berikut :

- Anak Balita Terlantar
- Anak Terlantar
- Anak yang Berhadapan dengan Hukum
- Anak Jalanan
- Anak dengan Kedisabilitas
- Anak yang menjadi Korban Tindak Kekerasan
- Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus
- Lanjut Usia Terlantar
- Penyandang Disabilitas
- Tuna Susila
- Gelandangan
- Pengemis
- Pemulung
- Kelompok Minoritas
- Bekas Warga Binaan Lembaga Perasyarakatan
- Orang dengan HIV/AIDS
- Korban Penyalahgunaan NAPZA
- Korban Traffiking
- Korban Tindak Kekerasan
- Pekerja Migran Bermasalah Sosial
- Korban Bencana Alam
- Korban Bencana Sosial
- Perempuan Rawan Sosial Ekonomi
- Fakir Miskin
- Keluarga Bermasalah Sosial Psikologis
- Komunitas Adat Terpencil

STRATEGI

Strategi adalah langkah-langkah yang berisi program-program indikatif untuk mewujudkan tujuan Dinas Sosial adapun strategi Dinas Sosial Kabupaten Deli Serdang yaitu penyelenggaraan kesejahteraan sosial yang meliputi :

- Rehabilitasi Sosial
- Jaminan Sosial
- Pemberdayaan Sosial
- Perlindungan Sosial



**Upaya-Upaya Dinas Sosial
Kabupaten Deli Serdang
dalam Pengentasan Kemiskinan
serta Layanan Rehabilitasi bagi PMKS**

Penyerahan Bantuan Hibah kepada Lembaga Kesejahteraan Sosial (LKS)

Penyerahan Bantuan Hibah kepada Lembaga Kesejahteraan Sosial (LKS). Sesungguhnya merupakan wujud usaha Pemerintah Kabupaten Deli Serdang untuk merealisasikan komitmen dalam rangka penguatan lembaga lembaga sosial agar lebih berdaya dalam menjalankan program-program yang berdimensi peningkatan kualitas masyarakat.



Pemerintah Kabupaten Deli Serdang melalui Dinas Sosial menyalurkan dana hibah kepada lembaga Kesejahteraan Sosial (LKS) di Aula Yayasan Pendidikan Tunanetra (YAPENTRA) Kecamatan Tanjung Morawa, Jumat, 19 Juli 2024.



Penanganan Orang Dengan Gangguan Jiwa (ODGJ) Terlantar

Penanganan kasus jiwa khususnya Orang Dengan Gangguan Jiwa (ODGJ) berat di Kabupaten Deli Serdang menghadapi banyak tantangan mengingat banyaknya kasus yang ditemukan pada penjangkauan pasien dengan gangguan jiwa ke seluruh desa yang ada di Kabupaten Deli Serdang. Banyaknya pasien jiwa yang tidak mempunyai identitas dan tidak mempunyai Kartu Indonesia Sehat menjadi kendala dalam pelayanan kesehatan. Selain itu ODGJ juga rentan terhadap kekerasan seks atau perlakuan seks menyimpang yang beresiko untuk tertular virus HIV. Virus HIV menyerang sistem kekebalan tubuh atau leukosit sehingga penderita menjadi lemah dan rentan terinfeksi berbagai jenis virus dan bakteri. Berdasarkan evaluasi data yang ditemukan bahwa kasus IO (Infeksi Opportunistik) pada penderita HIV adalah TB paru. Penularan TB sangat mudah terjadi melalui udara dan droplet infection.

Penanganan ODGJ oleh Dinas Sosial tidak sepenuhnya menjadi kewenangannya, melainkan hanya melakukan tindakan untuk memfasilitasi. Maka dari itu Dinas Sosial Kabupaten Deli Serdang bersama Perangkat Desa dan Karang Taruna bergerak untuk memfasilitasi sandang dan pangan terhadap ODGJ yang terlantar.



Melakukan Pendekatan kepada yang bersangkutan dengan memberikan makan dan minum

Keadaan setelah yang bersangkutan dimandikan dan dipakaikan pakaian bersih



Penanganan Orang Terlantar

Penanganan orang terlantar merupakan tanggung jawab bersama antara pemerintah daerah dan masyarakat. Berikut ini adalah beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam penanganan orang terlantar :

- Laporan masyarakat atau pihak yang berwenang, seperti surat keterangan terlantar dari Kepolisian atau Satpol PP
 1. Orang terlantar datang ke kantor kepolisian untuk meminta surat keterangan terlantar
 2. Orang terlantar didampingi pihak kepolisian datang ke Dinas Sosial
 3. Pemeriksaan dan registrasi dokumen untuk pemulangan orang terlantar
 4. Orang terlantar dipulangkan ke daerah asal
- Jika orang terlantar sakit maka akan dirujuk ke rumah sakit atau puskesmas



Orang terlantar An Susti Herawati Harahap mencari anaknya An Nurul Wahyuni Nainggolan tanggal 2 April 2024



Mencari anak ybs di wilayah kota Medan (daerah pasar tradisional sikambang)



Anak ybs berhasil ditemukan di daerah Percut Sei Tuan dan sudah dipertemukan oleh keluarganya

Layanan Rehabilitasi Sosial Dasar Bimbingan Fisik, Mental dan Spiritual bagi PMKS

Upaya untuk mengoptimalkan penanganan masalah kesejahteraan sosial terus dilakukan oleh pemerintah. Adapun tujuan utama optimalisasi penanganan kesejahteraan sosial secara berkelanjutan yang dilakukan oleh pemerintah adalah dalam upaya mengembalikan keberfungsian sosial warga masyarakat baik perseorangan, keluarga dan kelompok yang mengalami masalah sosial dan kemudian berkembang menjadi permasalahan sosial di tengah sistem kehidupan sosial masyarakat. Dimana salah satu bentuk penanganan masalah kesejahteraan sosial melalui pendekatan pemberian pelayanan sosial langsung bagi warga masyarakat yang mengalami masalah sosial adalah melalui serangkaian program dan kegiatan rehabilitasi sosial seperti halnya melalui kegiatan bimbingan mental spiritual, bimbingan fisik dan bimbingan sosial. Dengan adanya rangkaian kegiatan rehabilitasi sosial yang berbasiskan pada pemberian layanan sosial langsung seperti melalui pelaksanaan kegiatan bimbingan mental spiritual, fisik dan bimbingan sosial kepada warga masyarakat yang mengalami masalah sosial, tentunya diharapkan dapat mengembalikan keberfungsian sosial warga secara utuh di tengah – tengah kehidupan sistem sosial masyarakat. Hal ini sebagaimana pada pelaksanaan layanan sosial melalui kegiatan bimbingan mental spiritual, fisik dan bimbingan sosial yang diselenggarakan oleh Dinas Sosial Kabupaten Deli Serdang terhadap PMKS yang sedang direhab di Rumah Perlindungan Sosial (RPS).



Pengajian mingguan yang dilaksanakan sebagai bimbingan spiritual bagi PMKS



Kegiatan gotong royong dilaksanakan sebagai bimbingan fisik



Layanan pengecekan kesehatan bagi PMKS

Pemberian Bantuan Alat Bantu bagi Penyandang Disabilitas

Pemberian alat bantu kepada penyandang disabilitas adalah program yang bertujuan untuk membantu penyandang disabilitas dalam melakukan aktivitas sehari-hari. Alat bantu ini diharapkan dapat meningkatkan kemandirian, mobilitas, dan kualitas hidup penyandang disabilitas. Dalam upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat, Dinas Sosial Kabupaten Deli Serdang akan terus memantau kebutuhan dan memberikan bantuan yang diperlukan. Semoga dengan adanya bantuan ini, masyarakat yang membutuhkan dapat meraih kualitas hidup yang lebih baik dan merasa didukung dalam perjalanan rehabilitasi sosial mereka. Dalam kesempatan ini yang bertepatan dengan peringatan Hari Kesetiakawanan Sosial Nasional (HKSAN) Dinas Sosial Kabupaten Deli Serdang memberikan bantuan alat bantu kepada penyandang disabilitas tanggal 20 Desember 2024 di Gedung Balairung Pemkab Deli Serdang.



Mendampingi Dinas Sosial Provinsi Sumatera Utara Menyerahkan Bantuan UEP

Bidang Penanganan Fakir Miskin turut mendampingi Dinas Sosial Provinsi Sumatera Utara dalam penyaluran Bantuan Usaha Ekonomi Produktif (UEP) bagi pelaku usaha di bidang pembuatan keripik. Pada tahun ini, bantuan UEP difokuskan khusus bagi pelaku usaha di bidang pembuatan keripik, terutama Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM). Partisipasi Bidang Penanganan Fakir Miskin dalam mendampingi Dinas Sosial Provinsi Sumatera Utara dalam penyerahan bantuan ini menunjukkan komitmen untuk memastikan bahwa aspek perlindungan dan jaminan sosial juga menjadi perhatian dalam pemberian bantuan ekonomi produktif. Dengan pendekatan yang holistik, diharapkan bantuan UEP tidak hanya memberikan dorongan ekonomi, tetapi juga memberikan perlindungan dan jaminan sosial yang memadai bagi pelaku usaha. Semoga usaha pembuatan keripik yang diusulkan sesuai dengan kriteria yang telah ditetapkan oleh Dinas Sosial Provinsi Sumatera Utara. Dengan kerjasama antara berbagai bidang dan instansi terkait, diharapkan bantuan UEP dapat memberikan dampak positif dalam pengembangan UMKM di bidang pembuatan keripik dan meningkatkan kesejahteraan pelaku usaha di Provinsi Sumatera Utara.



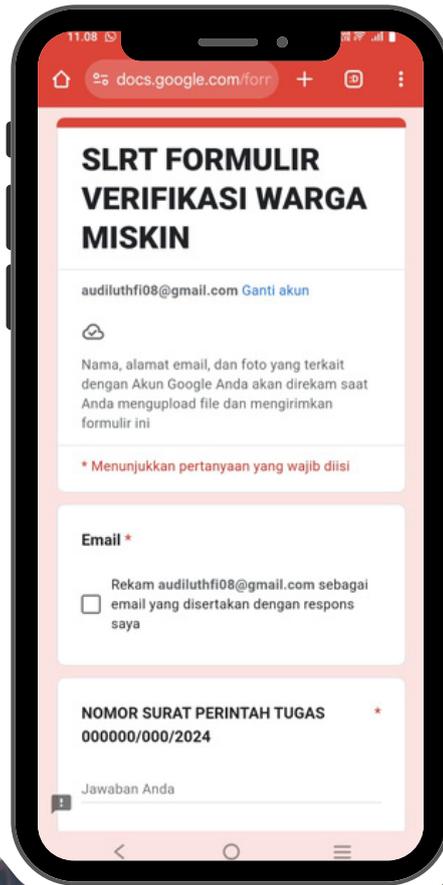
Dinas Sosial Kabupaten Deli Serdang mendampingi Dinas Sosial Provinsi dalam penyerahan bantuan Usaha Ekonomi Produktif (UEP) di Desa Sidoharjo I Pasar Miring Kecamatan Pagar Merbau tanggal 11 November 2024

Verifikasi dan Validasi Data Bansos

Data ini digunakan untuk menentukan penerima berbagai program bansos, seperti Kartu Indonesia Sehat (KIS), Program Keluarga Harapan (PKH), dan Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT). Tujuan verifikasi dan validasi (verval) data bansos tersebut adalah untuk:

- Memastikan bahwa Keluarga Penerima Manfaat (KPM) termasuk dalam kriteria miskin dan layak mendapatkan bantuan sosial
- Menyalurkan bantuan sosial tepat sasaran
- Membangun pola pikir masyarakat terkait bantuan sosial

Verifikasi dilakukan oleh desa/kelurahan yang diinput secara online melalui Google Form



The image shows a smartphone screen displaying a Google Form titled "SLRT FORMULIR VERIFIKASI WARGA MISKIN". The form is in Indonesian and includes the following fields and text:

- Header: **SLRT FORMULIR VERIFIKASI WARGA MISKIN**
- User: audiluthfi08@gmail.com [Ganti akun](#)
- Instructions: Nama, alamat email, dan foto yang terkait dengan Akun Google Anda akan direkam saat Anda mengupload file dan mengirimkan formulir ini
- Required field: * Menunjukkan pertanyaan yang wajib diisi
- Email field: Email *
Rekam audiluthfi08@gmail.com sebagai email yang disertakan dengan respons saya (checkbox)
- Task ID field: NOMOR SURAT PERINTAH TUGAS *
000000/000/2024
- Answer field: Jawaban Anda



Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT)

Perpres No.63/Tahun 2017 tentang Penyaluran Bantuan Sosial Secara Non Tunai (BSNT). Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) di peruntukan untuk keperluan pembelian Sembako, yang di berikan setiap bulannya dengan Nominal 200.000/bulan. Diharapkan dengan adanya bantuan ini, bisa meringankan KPM untuk membeli lauk pauk yang lebih bernutrisi dan bergizi. Pendampingan TKSK dalam hal penyaluran ialah, untuk memastikan KPM menerima sesuai dengan nominal yang masuk ke dalam KKS nya. Selain itu, sebagai wadah monitoring penyaluran, Jika sewaktu waktu ada permasalahan. Monitoring yang telah dilakukan oleh Dinas Sosial Kabupaten Deli Serdang, bertujuan untuk memantau dan mengetahui situasi dan kondisi lapangan dalam proses penyaluran Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT). Pendamping sembako dalam hal ini TKSK melakukan pendampingan kepada KPM yang akan melakukan transaksi di Kantor Pos. Berikut rekapitulasi jumlah KPM BPNT murni di Kabupaten Deli Serdang :



TKSK Pagar Merbau mendampingi KPM dalam penyaluran BPNT di kantor POS

NO	KECAMATAN	DTKS	BPNT
1	BANGUN PURBA	13.171	756
2	BATANG KUIS	22.333	807
3	BERINGIN	21.974	785
4	BIRU-BIRU	19.622	981
5	DELI TUA	12.904	354
6	GALANG	23.150	927
7	GUNUNG MERIAH	2.310	162
8	HAMPARAN PERAK	71.841	3.320
9	KUTALIMBARU	21.979	1.105
10	LABUHAN DELI	23.624	1.082
11	LUBUK PAKAM	24.826	924
12	NAMORAMBE	16.771	879
13	PAGAR MERBAU	22.745	983
14	PANCUR BATU	38.153	2.042
15	PANTAI LABU	28.335	1.092
16	PATUMBAK	29.073	1.058
17	PERCUT SEI TUAN	70.631	2.684
18	SIBOLANGIT	11.697	696
19	STM HILIR	17.388	1.043
20	STM HULU	8.824	569
21	SUNGGAL	42.234	1.093
22	TANJUNG MORAWA	76.091	4.026
TOTAL		619.749	27.368

Program Keluarga Harapan (PKH)

Dalam rangka menangani masalah kemiskinan di Kabupaten Deli Serdang, pemerintah menggunakan berbagai program dan stimulus untuk mengatasi masalah kemiskinan. Salah satu program khusus yang dikeluarkan pemerintah dalam rangka percepatan penanggulangan kemiskinan adalah Program Bantuan Tunai Bersyarat yang dikenal dengan nama Program Keluarga Harapan (PKH) yang dilaksanakan sejak tahun 2007. PKH sebagai upaya membangun sistem perlindungan sosial kepada masyarakat miskin dalam rangka mempertahankan dan meningkatkan kesejahteraan sosial penduduk miskin sekaligus sebagai upaya memotong rantai kemiskinan. PKH diberikan kepada Keluarga Sangat Miskin (KSM). Data keluarga yang dapat menjadi peserta PKH didapatkan dari Basis Data Terpadu dan memenuhi sedikitnya satu kriteria kepesertaan program berikut, yaitu:

1. Memiliki ibu hamil/nifas/anak balita
2. Memiliki anak usia 5-7 tahun yang belum masuk pendidikan dasar (anak pra sekolah)
3. Anak usia SD/MI/Paket A/SDLB (usia 7-12 tahun),
4. Anak SLTP/MTs/Paket B/SMLB (Usia 12-15),
5. Anak 15-18 tahun yang belum menyelesaikan pendidikan dasar termasuk anak dengan disabilitas.



Pendamping PKH mendampingi KPM dalam penyaluran bantuan PKH

Sistem Layanan dan Rujukan Terpadu (SLRT)

Sekretariat SLRT (Sistem Layanan dan Rujukan Terpadu) adalah sebuah sistem layanan yang bertujuan untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi sistem proteksi sosial dalam mengurangi kemiskinan, kerentanan, dan ketidaksetaraan. SLRT juga membantu mengidentifikasi kebutuhan masyarakat miskin dan rentan miskin seperti :

- Mengidentifikasi permasalahan masyarakat, terutama fakir miskin dan orang tidak mampu
- Menyambungkan masyarakat dengan program dan layanan yang dikelola oleh pemerintah dan non-pemerintah
- Membantu mengidentifikasi keluhan masyarakat miskin dan rentan miskin
- Melakukan rujukan dan memantau penanganan keluhan

Sekretariat SLRT kabupaten Deli Serdang berada di Dinas Sosial Kabupaten Deli Serdang, Saat ini SLRT Kabupaten Deli Serdang memiliki 41 Fasilitator yang tersebar di 22 Kecamatan yang ada di Kabupaten Deli Serdang. Sedangkan di Sekretariatnya sendiri terdapat 2 orang petugas Front Office dan 1 orang petugas Back Office.



Petugas Front Office sedang melayani masyarakat dalam pengurusan mendapatkan program bantuan Pemerintah

Penanganan terhadap Korban Bencana

Bencana alam yang realitanya tidak dapat diprediksi dan kerap menimbulkan dampak yang masif, termasuk salah satunya memicu terjadinya bencana sosial maka perlu adanya upaya pemenuhan kebutuhan korban bencana yang didorong dari berbagai aspek dan dilakukan secara terpadu. Salah satunya pada Aspek Perlindungan Sosial, dimana Direktorat Jenderal Perlindungan dan Perlindungan Sosial Cq. Direktorat Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam mempunyai tugas dan tanggung jawab di bidang aspek tersebut. Direktorat Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam sebagaimana diamanatkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 memiliki tugas pokok dan fungsi dalam melaksanakan perlindungan sosial korban bencana alam berupa pemenuhan kebutuhan dasar seperti pangan dan sandang yang bertujuan untuk meningkatkan kemampuan keluarga miskin dan rentan terdampak bencana dalam memenuhi kebutuhan dasar, yang dilaksanakan melalui langkah/tahapan sebagai berikut:

- Membangun sistem kesiapsiagaan dan mitigasi bencana
- Mengaktivasi sistem yang sudah dipersiapkan untuk penanggulangan bencana alam secara terpadu.
- Melakukan kegiatan penguatan dan pemulihan korban bencana alam sehingga mengembalikan keberfungsian sosial korban bencana alam.



RUMAH PERLINDUNGAN SOSIAL (RPS)

Rumah perlindungan sosial adalah tempat pelayanan sementara untuk memberikan pelayanan sementara untuk memberikan rasa aman kepada penerima pelayanan yang mengalami trauma akibat tindak kekerasan dan perlakuan salah dan konflik sosial yang memerlukan perlindungan.

TUGAS :

- Mengoordinasi, merumuskan sasaran, membina, mengarahkan dan menyelenggarakan seluruh UPT sesuai dengan kedudukan, tugas dan fungsi UPT
- Menyusun rencana program kerja dan anggaran belanja UPT
- Menyusun data, mengevaluasi dan menyiapkan laporan pelaksanaan program kerja dan penyusunan statistik dan dokumentasi di lingkungan UPT
- Menyampaikan laporan pelaksanaan program kerja dan kegiatan kepada Kepala Dinas dengan tembusan kepada Bupati setiap 6 bulan sekali
- Memberikan saran-saran dan pertimbangan kepada Kepala Dinas tentang langkah-langkah dan tindakan yang perlu diambil dalam bidang tugasnya
- melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan bidang tugasnya

FUNGSI :

- Perumusan kebijakan teknis tunggal dan/atau operasional sesuai dengan lingkup tugasnya
- Pembinaan dan pengawasan kegiatan tenaga fungsional dan/atau operasional di lingkungan kerjanya
- Pengoordinasian pelaksanaan tugas dan fungsinya ditingkat Kecamatan
- Pelaksanaan urusan tata usaha yang diperlukan
- Pelaksanaan pelayanan teknis fungsional dan/atau teknis operasional
- Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan tugasnya
- Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan bidang tugasnya

